



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/510/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR
100.3.3.2/403/2024 TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2024**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa Inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, dan Mengkoordinir Proyek Perubahan pada Program Pelatihan Kepemimpinan guna mencapai sasaran Inovasi Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan Daya Saing Daerah di Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah tingkat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, perlu diatur Regulasi Daerahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 319, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 319,a) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 324.a);

16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 670) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 730);
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 676).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 100.3.3.2/403/2024 TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024.**

KESATU : Merubah Lampiran dalam Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/403/2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan menambahkan Nomor 20 sampai dengan Nomor 70, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 31 Oktober 2024



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun:
 - Up. a. Kepala Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
 - b. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 100.3.3.2/ /2024
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG
MAS NOMOR 100.3.3.2/403/2024 TENTANG
PENETAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024

NAMA-NAMA INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Gerakan ASN Patuh Pemanfaatan SIMPEGNAS (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Sigma Optimalisasi Pengembangan Kompetensi PNS	
3	KERJA BARENG PENGUIN (Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Penurunan Stunting)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4	SI – JAPRI (Sistem Informasi Jaringan Perpipaan)	
5	Sido Cakep Optimalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Melalui Sistem Integrasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
6	Sistem Informasi Pemetaan PBB Berbasis Web (SI TAMPAN EBEB)	Badan Pendapatan Daerah
7	Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Pembayaran PBB-P2 Melalui Pemanfaatan Aplikasi Berbasis Web	
8	Operasi Transper (Optimalisasi Elektronifikasi Transsaksi Pemerintah Daerah	

9	Peningkatan Verifikasi Dan Validasi RKA-SKPD (Paypal) Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	Badan Keuangan dan Aset Daerah
10	Optimalisasi Media Informasi Berbasis Website	
11	Peningkatan Sistem Pemberian Panjar Kegiatan (Siber Pantan)	
12	Sistem Informasi Aplikasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (SIAPDes)	
13	SOP BAJANG PARIS (Standar Operasional Prosedur Pembayaran Tunjangan Untuk Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tugas Belajar)	
14	PAS FKDM (Pelaporan Atasi Situasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Publik	
16	Strategi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Mas	
17	Optimalisasi Koordinasi Stakeholder Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Gunung Mas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Strategi Peningkatan Kinerja BPBD Kabupaten Gunung Mas Dengan Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)	
19	JAS CILIK TUNTAS (Kerjasama Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Di Sekolah)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
20	Gunung Mas Smart Virtual City (GUMASVI)	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
21	Ketahanan Pangan Keluarga Terpadu (KAPAKAT)	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
22	Langkah Strategis Menuju Kabupaten Gunung Mas Bebas Zona Merah Kerentanan Pangan	
23	Peningkatan Diversifikasi Pengolahan dan Sistem Pemasaran Hasil Produksi Ikan Patin	

24	Si-WADI (Sistem Pengawasan Digital)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Melalui Pemanfaatan SITEGAB (Sistem Tabel Excel Kenaikan Gaji Berkala)	
26	Optimalisasi Pelayanan Penginpuntan Anggaran Secara Digital (Sitanggar)	
27	K- Pingin (Kios Pengendali Inflasi Terintegrasi di Kabupaten Gunung Mas	
28	Akselerasi Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (Uppka) Melalui Kerjasama Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Gunung Mas “SINERGI JUARA”	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SIPMAS)	Inspektorat
30	Strategi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
31	Huma Karigas Jiwa	Dinas Kesehatan
32	Jaga Huma Lewu	
33	Ela Laya (Gerakan Layanan Asuhan Dalam Aksi Nyata Asi Eksklusif)	
34	EDISI WEI (Ela Dia Nenga ASI Bewei)	
35	Peningkatan Koordinasi Stekholder Terkait Intervensi Spesifik Percepatan Penurunan Stanting Di Kabupaten Gunung Mas	

36	Sistem Informasi Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik (SIPET)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
37	Optimalisasi Pengelolaan Data Kepegawaian Melalui E-Data Base Kepegawaian	
38	Optimalisasi Pengawasan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Perusahaan Besar Swasta	
39	KETAPANG GAYA (Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya)	Dinas Pertanian
40	Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Gunung Mas	
41	Optimalisasi Alat-Alat Mesin Menuju Pertanian Yang Modern dan Berkelanjutan	
42	Pembuatan Animasi Mandiri Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Siswa (PAM-MPASI)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
43	Pembaharuan Sistem Informasi Sekolah	
44	Efektivitas Pengarsipan Berkas Kontrak Bidang Sarana Prasarana SD dan SMP Berbasis ATHB Dengan Menggunakan Google Drive (SEMBARAU-G DRIVE)	
45	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama	
46	Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru Berbasis Digital (Pantun Si Gita)	Dinas Sosial
47	Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Penguatan Peran Pemerintah Desa/Kelurahan	
48	SIKAT INSPIRATIF (Strategi Peningkatan Layanan Infrastruktur Menunjang Pariwisata Melalui Pembangunan Kolaboratif)	Dinas Pekerjaan Umum
49	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Dan Cuti Tahunan PNS Melalui Sistem Notifikasi Whatsapp (S I N O W A)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

50	Peningkatan Tata Kelola Data Kepegawaian Secara Online (PETADAWAI)	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
51	Strategi Peningkatan Produktifitas Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Siap Pakai (Gita Asem Manta)	
52	Strategi Management Pengelolaan Persampahan Menuju Sanitasi Lingkungan Berkelanjutan Melalui (Galeri Kusak Eka Plastik)	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan
53	Penataan Sistem Pengelolaan Piutang Jasa Layanan RSUD Kuala Kurun	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun
54	Optimalisasi Capaian Universal Health Coverage Kabupaten Gunung Mas Sebagai Langkah Strategi Pemecahan Piutang Jasa Layanan Umum Di BLUD RSUD Kuala Kurun	
55	Pengembangan Model Manajemen Talenta Atas Keterbatasan Tenaga ASN Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Prima Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas	Kecamatan Kurun
56	OPSTEN (Optimalisasi Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	
57	Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Base	Kecamatan Rungan
58	PENGEMBANGAN BUMDES MELALUI " OM STEPANUS "(Optimalisasi Sistem Pelayanan Khusus)	
59	Optimalisasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Posko Reaksi Cepat Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Kecamatan Rungan Barat "Ogah Karhutla Melalui Simpance Bahula"	Kecamatan Rungan Barat
60	Peningkatan Produksi Pangan Lokal	Kecamatan Miri Manasa
61	Penanaman Seribu Pisang Desa (PASTI-PD)	

62	Strategi Partisipasi Musrembang Tingkat Kecamatan Sepang Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Dan Stakeholder Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas	Kecamatan Sepang
63	Optimalisasi Kualitas Layanan Publik	
64	Sistem Pelayanan Kecamatan Berbasis Web (SIMPEL KEBWAB)	Kecamatan Rungan Hulu
65	Penyelesaian Tapal Batas Desa dan Kelurahan (Pintaran)	
66	PABO SARA (Paman Bakso Sadar Sampah)	Kecamatan Damang Batu
67	Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)	Kecamatan Manuhing
68	Optimalisasi Pendampingan Bumdes	Kecamatan Manuhing Raya
69	Mekanisme Penerbitan SKD Pada Kantor Kelurahan Kampuri	Kecamatan Mihing Raya
70	OM - PBB (Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan)	Kecamatan Tewah

PI. BUPATI GUNUNG MAS,



HERSON B. ADEN